



Transformasi Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Pendidikan Politik: Studi Kasus Banteng Muda Indonesia di Provinsi Lampung

Nadya Mahamida

Universitas Lampung

Sinta Bella Farah Kirani

Universitas Lampung

Rozalia

Universitas Lampung

Teki Prasetyo

Universitas Lampung

Ana Mentari

Universitas Lampung

Alamat: Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, Indonesia.

Korespondensi penulis : nadyamahamida@gmail.com

Abstrak. *This study aims to analyze the transformation of youth organizations' roles in political education in Indonesia, focusing on the Banteng Muda Indonesia (BMI) organization in Lampung Province. As the youth wing of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), BMI holds a crucial role in promoting political values, disseminating party ideology, and shaping the political awareness of the younger generation. The transformation of this role is significant to examine in light of the evolving political landscape, shifting preferences among youth, and new challenges in political communication influenced by social media and information technology. This research investigates how BMI Lampung has adjusted its approaches and strategies in political education over time. Previously, the organization's approach tended to be indoctrinative and top-down; however, it has gradually shifted towards a more participatory and dialogical model. In this new model, young cadres are empowered to engage actively in political discussions, leadership training, and community service activities. This transformation reflects not only internal organizational change but also an adaptive response to external factors such as increasing political apathy and declining public trust in political parties.*

Keywords: *Banteng Muda Indonesia; political education; youth empowerment; youth organization*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi peran organisasi kepemudaan dalam pendidikan politik di Indonesia, dengan fokus pada organisasi Banteng Muda Indonesia (BMI) di Provinsi Lampung. BMI sebagai organisasi sayap kepemudaan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki peran penting dalam menyosialisasikan nilai-nilai politik, ideologi partai, serta membentuk kesadaran politik generasi muda. Transformasi peran ini menjadi penting untuk dikaji mengingat dinamika politik yang terus berkembang, perubahan preferensi generasi muda, serta tantangan baru dalam komunikasi politik yang dipengaruhi oleh media sosial dan teknologi informasi. Penelitian ini mengkaji bagaimana BMI Lampung menyesuaikan pendekatan dan strategi pendidikan politik dari waktu ke waktu. Sebelumnya, pendekatan pendidikan politik lebih bersifat mencuci otak dan perencanaan strategi, namun kini cenderung bergeser ke arah yang lebih partisipatif dan dialogis, di mana kader muda diberdayakan untuk terlibat aktif dalam diskusi politik, pelatihan kepemimpinan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Transformasi ini tidak hanya mencerminkan perubahan internal dalam tubuh organisasi, tetapi juga respon terhadap konteks eksternal seperti meningkatnya apatisme politik dan menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik

Kata Kunci: *Banteng Muda Indonesia; pemberdayaan pemuda; pendidikan politik;*

organisasi kepemudaan

PENDAHULUAN

Organisasi kepemudaan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam mendukung proses kaderisasi kepemimpinan serta penguatan kesadaran politik generasi muda. Sejak masa pergerakan nasional, pemuda telah memainkan peran strategis dalam dinamika sosial dan politik Indonesia. Keikutsertaan pemuda dalam sejarah perjuangan kemerdekaan menunjukkan bahwa semangat dan idealisme kaum muda mampu menjadi kekuatan transformasional dalam perubahan sosial. Dalam konteks demokrasi kontemporer, peran tersebut terus mengalami transformasi yang menuntut organisasi kepemudaan untuk menyesuaikan diri dengan tantangan zaman.

Perkembangan demokrasi dan sistem politik yang semakin terbuka mendorong organisasi kepemudaan untuk tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya anak muda, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran politik yang membentuk karakter dan kesadaran bernegara. Pendidikan politik di kalangan pemuda menjadi aspek krusial yang dapat menentukan kualitas demokrasi di masa depan. Hal ini menuntut organisasi kepemudaan untuk menjalankan peran edukatif, advokatif, dan partisipatif secara simultan dan berkesinambungan. Dalam proses tersebut, transformasi peran organisasi kepemudaan menjadi relevan untuk dikaji secara mendalam.

Transformasi peran ini tidak hanya ditentukan oleh perkembangan internal organisasi, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti perubahan kebijakan negara, dinamika partai politik, perkembangan teknologi informasi, dan pola pikir generasi muda itu sendiri. Organisasi kepemudaan harus mampu membangun pendekatan yang kontekstual dan inovatif dalam menyampaikan nilai-nilai politik kepada para anggotanya. Pendidikan politik yang sebelumnya bersifat formal dan elitis, kini harus dikemas lebih inklusif dan partisipatif agar dapat diterima oleh pemuda yang hidup dalam era digital dan serba cepat.

Banteng Muda Indonesia (BMI), sebagai salah satu organisasi kepemudaan yang berafiliasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), merupakan contoh menarik dari transformasi peran organisasi pemuda dalam pendidikan politik. Sebagai sayap pemuda partai, BMI tidak hanya bertugas menggalang dukungan politik, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan kaderisasi serta penguatan pemahaman politik di kalangan anak muda. Di Provinsi Lampung, BMI cukup aktif dalam berbagai kegiatan sosial-politik yang bertujuan untuk memperkuat basis pemuda yang sadar politik, nasionalis, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Kehadiran BMI di Provinsi Lampung mencerminkan bagaimana organisasi kepemudaan dapat memainkan peran strategis di tingkat lokal dalam menjembatani kepentingan politik dan pendidikan masyarakat. Berbagai program seperti pelatihan kader, diskusi publik, seminar kebangsaan, serta aksi sosial menjadi sarana pendidikan politik yang nyata dan langsung menyentuh kehidupan pemuda. Transformasi peran BMI di wilayah ini juga ditunjukkan melalui pendekatan digitalisasi dan kolaborasi lintas sektor dalam menyampaikan pesan-pesan politik yang relevan dan membangun.

Namun, proses transformasi ini tentu tidak lepas dari tantangan. BMI di Provinsi Lampung menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya minat generasi muda terhadap politik, serta stigma negatif terhadap organisasi kepemudaan yang berafiliasi dengan partai politik. Tantangan-tantangan ini mendorong perlunya strategi yang adaptif dan inovatif dalam menjalankan fungsi pendidikan politik, agar organisasi tidak kehilangan relevansinya di tengah arus apatisme dan pragmatisme politik yang berkembang.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara kritis bagaimana transformasi peran organisasi kepemudaan, khususnya Banteng Muda Indonesia di Provinsi Lampung, dalam konteks pendidikan politik. Fokus kajian meliputi bentuk-bentuk kegiatan pendidikan politik yang dijalankan, pendekatan yang digunakan, serta dampaknya terhadap peningkatan kesadaran politik generasi muda. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya literatur tentang peran organisasi kepemudaan serta memberikan masukan praktis bagi pengembangan strategi pendidikan politik berbasis organisasi pemuda. Melalui pendekatan studi kasus, artikel ini juga berupaya menangkap dinamika lokal yang mungkin tidak terwakili dalam narasi besar nasional, namun memiliki signifikansi dalam pembangunan demokrasi dari akar rumput. Transformasi peran organisasi kepemudaan seperti BMI di daerah menjadi cermin dari perubahan yang lebih luas dalam praktik politik dan partisipasi pemuda Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengangkat dan mengevaluasi peran organisasi seperti BMI agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman secara berkelanjutan.

KAJIAN TEORI

Organisasi kepemudaan memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran politik generasi muda. Melalui pendidikan politik, organisasi seperti Banteng Muda Indonesia (BMI) di Provinsi Lampung dapat menjadi agen perubahan yang mendorong partisipasi aktif pemuda dalam kehidupan demokratis. Transformasi peran organisasi kepemudaan dalam konteks ini mencerminkan adaptasi terhadap dinamika politik dan sosial yang terus berkembang. Pendidikan politik merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman individu mengenai sistem politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan politik. Organisasi kepemudaan seperti BMI memainkan peran penting dalam menyelenggarakan pendidikan politik melalui berbagai kegiatan, seperti diskusi, seminar, dan pelatihan kepemimpinan. Hal ini sejalan dengan temuan Sukamsi et al. (2025) yang menunjukkan bahwa organisasi pelajar dapat menjadi wadah simulasi demokrasi yang efektif, sehingga generasi muda tidak hanya memahami konsep politik, tetapi juga siap berkontribusi aktif dalam membangun masyarakat yang demokratis, adil, dan bermoral.

Transformasi peran organisasi kepemudaan mencerminkan perubahan fungsi dan strategi dalam menghadapi tantangan zaman. Organisasi seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) telah berupaya meningkatkan partisipasi politik pemuda melalui program kaderisasi dan pelatihan. Nugraha (2015) mencatat bahwa DPD KNPI Jawa Barat melaksanakan program-program seperti pelatihan dan workshop pemahaman nilai-nilai politik kepada pemuda secara rutin, meskipun menghadapi kendala seperti apatisisme pemuda dan kurangnya koordinasi antarorganisasi. Selain itu, organisasi kepemudaan juga berperan dalam membangun karakter positif generasi muda. Gusti Ayu Tita (2024) menekankan pentingnya kegiatan organisasi dalam mengembangkan keterampilan kepemimpinan, membentuk identitas diri, dan mendorong kreativitas serta inovasi di kalangan pemuda. BMI di Provinsi Lampung telah menunjukkan peran aktif dalam pendidikan politik pemuda. Melalui kegiatan seperti diskusi kebangsaan, pelatihan kepemimpinan, dan simulasi pemilu, BMI berupaya meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi aktif generasi muda. Hal ini sejalan dengan temuan Pratama (2023) yang menunjukkan bahwa pendidikan politik dalam organisasi mahasiswa seperti KAMMI dan IMM dapat membentuk budaya politik Pancasila di kalangan mahasiswa. Namun, tantangan tetap ada, seperti kurangnya logistik dan pendanaan, serta kurangnya pendalaman wawasan nilai-nilai Pancasila di kalangan anggota. Faishol (2019) mencatat bahwa GP Ansor Blora Kota menghadapi kendala serupa dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan ketahanan ideologi pemuda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam transformasi peran organisasi kepemudaan Banteng Muda Indonesia (BMI) dalam pendidikan politik di Provinsi Lampung. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dinamika internal organisasi serta strategi yang digunakan dalam mendidik dan membentuk kesadaran politik pemuda. Subjek penelitian adalah Bapak Irwansyah Agung sebagai sekretaris umum Dpd BMI provinsi Lampung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap aktivitas serta arsip organisasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur guna memperoleh data yang kaya dan mendalam tentang peran serta tantangan yang dihadapi oleh organisasi dalam menjalankan fungsi pendidikan politik. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik, serta peningkatan ketekunan dan pengecekan anggota (member check) untuk memastikan keabsahan temuan. Hasil dari metodologi ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi organisasi kepemudaan dalam membangun kesadaran politik di kalangan generasi muda, serta memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan peran organisasi serupa di masa depan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Pada bab hasil penelitian diuraikan mengenai hasil observasi dan wawancara Sekretaris dari organisasi kepemudaan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk pencarian data terkait peran organisasi kepemudaan dalam pendidikan politik dan hasil wawancara tersebut adalah

Banteng Muda Indonesia (BMI) merupakan organisasi sayap dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang didirikan pada 29 Maret 2000 di Semarang. Awalnya, BMI adalah organisasi kemasyarakatan yang menyalurkan aspirasi politik kepada PDI Perjuangan. Setelah melalui konsolidasi dan pembentukan kepengurusan di berbagai daerah, BMI resmi menjadi sayap partai PDI Perjuangan pada 9 September 2006, berdasarkan Ketetapan DPP PDI Perjuangan Nomor: 034/TAP/DPP/XII/2006. Tujuan utama organisasi ini adalah mendidik dan menyiapkan kader-kader muda yang memiliki integritas, nasionalisme, dan kesadaran politik yang tinggi. Organisasi ini ada dan hadir dikhususkan untuk anak-anak muda. Organisasi ini sendiri tidak hanya bergerak dan berfokus pada bidang politik, tetapi Organisasi BMI ini juga bergerak di bidang sosial masyarakat, membantu menyampaikan aspirasi masyarakat, dan memberikan edukasi politik. Contoh bentuk kegiatan yang dilakukan oleh BMI seperti: konsultasi hukum gratis, aksi sosial dan bantuan bencana, sunatan massal, kegiatan hiburan seperti game e- sport, dan pembagian takjil saat Ramadan. Selain itu, BMI aktif dalam seminar kebangsaan, pelatihan kepemimpinan, dan pengembangan UMKM bagi pemuda.

Banteng Muda Indonesia (BMI) merupakan salah satu organisasi kepemudaan yang berafiliasi langsung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sejak awal pendiriannya pada tahun 2000 di Kota Semarang, organisasi ini tidak dapat dipisahkan dari dinamika dan strategi politik PDI-P dalam membangun basis massa di kalangan generasi muda. Peran awal BMI secara politis sangat erat dengan kebutuhan PDI-P untuk memperkuat jaringan kaderisasi serta membentuk barisan pendukung militan yang memahami dan mendalami ideologi partai, khususnya ajaran-ajaran Bung Karno seperti Marhaenisme, nasionalisme, dan kerakyatan. Sebagai sayap kepemudaan, BMI pada fase

awal keberadaannya lebih banyak bergerak dalam fungsi mobilisasi. Dalam konteks ini, BMI diarahkan untuk menjadi ujung tombak partai dalam menjaring simpati dan partisipasi anak muda dalam kegiatan politik. Fungsi ini penting karena kalangan muda seringkali menjadi kelompok yang apatis terhadap politik. Maka, melalui BMI, PDI-P dapat menyentuh segmen ini dengan pendekatan yang lebih komunikatif, populis, dan sesuai dengan gaya komunikasi generasi muda. BMI pun turut berperan dalam memperkuat jaringan elektoral PDI-P, terutama menjelang momentum pemilu, baik di tingkat nasional maupun lokal. Aktivitas seperti kampanye, penggalangan massa, distribusi informasi politik, hingga pengawasan pelaksanaan pemilu menjadi bagian dari tugas BMI di lapangan.

Selain mobilisasi, peran awal BMI juga berkisar pada pendidikan politik dan internalisasi ideologi. Organisasi ini bukan hanya ditugaskan untuk menarik dukungan, tetapi juga mendidik anggotanya agar menjadi kader politik yang militan dan memiliki kesadaran ideologis. Oleh karena itu, sejak awal, BMI menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan, sekolah politik, serta diskusi-diskusi ideologis yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan ajaran Bung Karno.

Dengan demikian, BMI diposisikan sebagai lembaga kaderisasi yang memiliki orientasi jangka panjang, yaitu mencetak calon pemimpin muda yang memiliki loyalitas terhadap PDI-P dan mampu mengartikulasikan nilai-nilai kerakyatan dalam praktik politik. Dalam praktiknya, BMI juga menjadi wadah alternatif anak muda yang memiliki minat dalam aktivisme politik namun belum cukup usia atau pengalaman untuk masuk dalam struktur formal partai. BMI memberikan ruang belajar politik yang terstruktur, sekaligus menjadi tempat berlatih bagi generasi muda dalam memahami dinamika partai politik, strategi elektoral, serta tata kelola organisasi.

Peran ini sangat penting dalam regenerasi kader partai dan menjadi jawaban atas kebutuhan partai dalam memperbaharui diri dengan energi dan gagasan baru dari generasi muda. Kehadiran BMI juga menjawab tantangan politik di era reformasi yang menuntut partai politik untuk lebih inklusif dan responsif terhadap aspirasi generasi muda. Dalam hal ini, BMI tidak hanya menjadi alat partai, tetapi juga berkembang menjadi entitas yang mampu menyuarakan isu-isu kepemudaan, seperti pendidikan, lapangan kerja, digitalisasi, dan kesetaraan sosial. Dalam beberapa konteks, BMI juga mulai mendorong partisipasi politik perempuan muda dan mengangkat isu-isu keberagaman, lingkungan, serta hak-hak minoritas, sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika sosial-politik yang terus berubah. Sinergi antara BMI dan struktur PDI-P juga terlihat dalam proses konsolidasi organisasi. BMI secara aktif membentuk kepengurusan di berbagai provinsi, kabupaten, hingga tingkat kecamatan. Hal ini menunjukkan keseriusan organisasi dalam memperluas basis massa dan memperkuat struktur partai melalui jalur kepemudaan. Di daerah-daerah, termasuk di Provinsi Lampung, BMI turut menjadi aktor penting dalam memenangkan PDI-P di berbagai ajang pemilu. Mereka bekerja sama dengan DPC dan DPD partai untuk melakukan kerja-kerja elektoral seperti door to door campaign, penguatan saksi TPS, serta pemetaan suara di kalangan pemilih muda. Dalam banyak kasus, BMI juga menjadi jembatan antara aspirasi pemuda dan partai. Mereka berperan sebagai agen perubahan sosial-politik yang membawa dinamika baru dalam tubuh PDI-P. Dalam hal ini, BMI tidak hanya bersifat instrumental tetapi juga strategis, karena mampu menjadi penghubung antara ideologi partai dengan realitas sosial masyarakat muda. Peran ini semakin menegaskan posisi BMI sebagai bagian penting dari sistem politik partai, bukan sekadar organisasi pendukung, melainkan sebagai kekuatan ideologis dan elektoral yang hidup dan aktif. Berdasarkan berbagai referensi, termasuk situs resmi Banteng Muda Indonesia, laporan dari media seperti Gesuri, Mablesnews, dan dokumen internal partai, terlihat bahwa BMI sejak awal diarahkan untuk menjalankan peran politik yang luas dan terstruktur. BMI bukan sekadar organisasi massa atau perkumpulan anak muda, tetapi bagian dari strategi besar PDI-P dalam membangun partai modern yang berbasis kader dan memiliki jaringan yang kokoh di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, memahami peran awal

BMI tidak bisa dilepaskan dari strategi ideologisasi dan modernisasi partai yang terus dijalankan oleh PDI Perjuangan.

Perubahan orientasi dan strategi pendidikan politik dalam organisasi kepemudaan seperti Banteng Muda Indonesia (BMI) mencerminkan respons adaptif terhadap dinamika sosial-politik yang terus berkembang. Transformasi ini didorong oleh beberapa faktor utama, antara lain tuntutan zaman, kritik publik, dan perubahan dalam proses kaderisasi, yang secara bersama-sama membentuk paradigma baru dalam pendekatan pendidikan politik. Tuntutan zaman menuntut organisasi kepemudaan untuk mengadopsi metode dan media yang sesuai dengan karakter generasi muda saat ini. Dengan kemajuan teknologi dan informasi, penyampaian pendidikan politik tidak lagi sekadar melalui cara-cara konvensional, tetapi harus melibatkan platform digital, interaksi daring, dan media sosial sebagai sarana utama dalam menjangkau dan mengedukasi anggota dan masyarakat luas. Perubahan ini bukan hanya soal metode, tetapi juga menyesuaikan isi materi agar lebih relevan dengan isu-isu aktual yang dihadapi bangsa dan dunia. Selain itu, tuntutan zaman mengharuskan organisasi kepemudaan untuk semakin inklusif dan responsif terhadap aspirasi pemuda, sehingga pendidikan politik yang diselenggarakan menjadi lebih partisipatif dan demokratis.

Kritik publik terhadap organisasi kepemudaan menjadi stimulus penting untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan politik. Kritik yang sering muncul berkenaan dengan transparansi, relevansi program, dan kapasitas organisasi mendorong BMI untuk memperbaiki tata kelola internal serta memperkaya konten pendidikan agar tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga aplikatif dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Kritik ini mendorong organisasi untuk mengembangkan program yang lebih konkret seperti pelatihan advokasi yang memberi keterampilan praktis bagi kader dalam memperjuangkan hak-hak politik dan sosial masyarakat, serta dialog publik sebagai ruang untuk membangun kesadaran politik secara terbuka dan demokratis.

Perubahan kaderisasi juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi orientasi pendidikan politik. Kaderisasi tidak lagi hanya bertumpu pada pembekalan ideologi partai, tetapi juga menekankan pengembangan soft skills, kepemimpinan, serta kemampuan analisis dan advokasi. Organisasi memperluas cakupan pendidikan politiknya dengan memasukkan pelatihan advokasi, simulasi pengambilan keputusan politik, dan kegiatan dialog yang memfasilitasi interaksi kritis antara kader dan masyarakat. Proses kaderisasi yang dinamis ini memastikan keberlanjutan kualitas kepemimpinan yang adaptif dan inovatif.

Dalam pelaksanaan pendidikan politik, BMI menggelar berbagai jenis kegiatan yang bersifat terstruktur dan sistematis. Sekolah kader menjadi pilar utama, di mana kader mendapatkan pembekalan teori dan praktik politik secara mendalam dan berjenjang. Selain itu, pelatihan advokasi memberikan keterampilan praktis dalam memperjuangkan kepentingan politik dan sosial, termasuk kemampuan bernegosiasi, komunikasi efektif, dan pemahaman regulasi. Dialog publik juga menjadi bagian penting sebagai forum diskusi dan pertukaran gagasan antara kader, masyarakat, dan tokoh politik, guna membangun kesadaran kolektif dan memperkuat demokrasi partisipatif.

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan politik BMI sangat menitikberatkan pada nasionalisme, demokrasi, dan Pancasila sebagai dasar negara. Nasionalisme diajarkan sebagai cinta tanah air yang mendorong kader untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan semangat kebersamaan dan persatuan. Demokrasi dipahami bukan hanya sebagai sistem politik, tetapi sebagai nilai hidup yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pancasila diposisikan sebagai fondasi moral dan ideologis yang mengarahkan seluruh aktivitas politik dan sosial kader agar selaras dengan prinsip keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Inovasi dan digitalisasi dalam pendidikan politik menjadi sangat krusial di era modern, khususnya dalam menjangkau dan memberdayakan generasi muda yang sangat akrab dengan teknologi digital. Organisasi kepemudaan seperti Banteng Muda Indonesia (BMI) memanfaatkan berbagai platform media sosial populer seperti Instagram, TikTok, dan YouTube

untuk menyebarkan edukasi politik yang lebih menarik, mudah diakses, dan relevan dengan gaya komunikasi generasi milenial dan Z.

Penggunaan media sosial sebagai alat edukasi politik memungkinkan penyampaian informasi yang cepat dan luas dengan format yang variatif, mulai dari video singkat, infografis, hingga sesi tanya jawab interaktif. Misalnya, Instagram dan TikTok digunakan untuk membagikan konten politik dalam bentuk video pendek yang mudah dicerna dan mengandung pesan kuat tentang nilai-nilai demokrasi, pentingnya partisipasi politik, atau pemahaman terhadap sistem pemerintahan. YouTube menyediakan ruang untuk konten yang lebih mendalam, seperti diskusi panel, wawancara dengan tokoh politik, dan materi pembelajaran yang dapat diakses kapan saja. Pendekatan ini sangat efektif untuk membangun literasi politik digital sekaligus menarik minat generasi muda yang cenderung memiliki rentang perhatian pendek.

Selain itu, pembuatan konten politik edukatif menjadi bagian inti dari strategi digitalisasi pendidikan politik. Konten ini dirancang tidak hanya untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk mendorong keterlibatan aktif dan refleksi kritis. Konten edukatif meliputi penjelasan konsep-konsep dasar politik, analisis isu-isu strategis nasional dan global, serta kampanye kesadaran tentang hak-hak politik warga negara. Dengan memanfaatkan storytelling yang menarik dan bahasa yang mudah dipahami, konten-konten ini membantu mengurangi kompleksitas politik yang sering dianggap sulit oleh pemuda, sehingga mereka lebih termotivasi untuk memahami dan ikut berpartisipasi dalam proses demokrasi. Selain inovasi digital, kolaborasi dengan lembaga pendidikan formal dan komunitas menjadi elemen penting dalam memperkuat pendidikan politik. Organisasi kepemudaan seperti BMI aktif menjalin kemitraan dengan sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas lokal untuk menyelenggarakan workshop, seminar, dan pelatihan yang mengintegrasikan pendidikan politik ke dalam kurikulum maupun kegiatan ekstrakurikuler. Melalui kolaborasi ini, pesan-pesan pendidikan politik tidak hanya disampaikan melalui dunia maya, tetapi juga mendapatkan penguatan lewat interaksi langsung dan pembelajaran kontekstual di lapangan. Kerja sama dengan komunitas juga membuka ruang dialog yang lebih inklusif dan memberdayakan anggota komunitas untuk turut mengawasi dan mengkritisi proses politik secara konstruktif.

Beberapa studi mendukung efektivitas pendekatan inovatif ini. Misalnya, penelitian oleh Panggabean dan Yuwono (2023) menekankan pentingnya penggunaan media digital dalam pendidikan politik untuk meningkatkan literasi dan partisipasi politik generasi muda. Mereka menemukan bahwa media sosial tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga media edukasi yang dapat memperluas jangkauan dan dampak pendidikan politik. Selain itu, peran kolaborasi antara organisasi kepemudaan dengan lembaga pendidikan dalam memperkuat peran pemuda sebagai agen perubahan sosial-politik.

Secara keseluruhan, inovasi dan digitalisasi dalam pendidikan politik melalui media sosial, pembuatan konten edukatif yang menarik, serta kolaborasi strategis dengan lembaga pendidikan dan komunitas menjadi kunci dalam mengoptimalkan peran organisasi kepemudaan. Pendekatan ini tidak hanya relevan dengan karakteristik generasi muda saat ini, tetapi juga efektif dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi politik yang lebih luas dan berkelanjutan. Pernyataan tersebut menggambarkan tantangan dan strategi yang dilakukan oleh Barisan Muda Indonesia (BMI) dalam mendorong keterlibatan pemuda dalam dunia politik. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya minat pemuda terhadap politik. Banyak pemuda menganggap politik sebagai sesuatu yang rumit, membosankan, atau bahkan kotor, sehingga mereka enggan terlibat secara langsung. Selain itu, akses terhadap teknologi yang tidak merata juga menjadi kendala tersendiri. Meskipun era digital telah berkembang pesat, tidak semua pemuda di berbagai wilayah memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses informasi dan mengikuti perkembangan politik secara daring. Masalah lain yang muncul adalah pola pikir apatis di kalangan generasi muda. Sebagian besar dari mereka merasa bahwa keterlibatan politik tidak akan membawa perubahan nyata, sehingga memilih untuk bersikap pasif. Menghadapi berbagai tantangan tersebut, BMI

melakukan sejumlah upaya strategis. Salah satunya adalah pendekatan edukatif berbasis digital. Melalui platform daring, BMI menyajikan materi-materi politik dalam format yang lebih menarik dan mudah dipahami, sehingga mampu meningkatkan kesadaran politik pemuda.

Selain itu, BMI juga menjalin kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain. Kerja sama ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dan pengaruh organisasi dalam membentuk kesadaran politik di kalangan pemuda. Kampanye melalui media sosial juga menjadi langkah penting yang dilakukan BMI. Dengan memanfaatkan media sosial, BMI dapat menjangkau pemuda secara lebih luas dan menyampaikan pesan-pesan politik dalam format yang kreatif, interaktif, dan relevan dengan kehidupan generasi muda saat ini. Melalui strategi-strategi tersebut, BMI berusaha membangun kembali kepercayaan dan ketertarikan pemuda terhadap politik serta menciptakan ruang partisipasi yang inklusif dan produktif bagi generasi muda. Pemuda merupakan aset strategis bangsa yang memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Mereka tidak hanya pewaris masa depan, tetapi juga aktor perubahan (*agents of change*) dalam berbagai sektor kehidupan. Namun, tantangan yang dihadapi pemuda saat ini semakin kompleks, seperti dekadensi moral, krisis identitas, hingga pengaruh negatif globalisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan nasional yang konkret untuk membentuk karakter dan kepemimpinan pemuda agar mereka menjadi generasi yang berintegritas, nasionalis, dan kontributif.

Dalam konteks inilah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menerbitkan beberapa peraturan, dua di antaranya yang sangat relevan adalah Permenpora Nomor 825 Tahun 2014 dan Permenpora Nomor 59 Tahun 2013. Kedua regulasi ini menjadi landasan penting dalam menyelenggarakan pelatihan karakter, penguatan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, serta pengembangan kepemimpinan pemuda di Indonesia. Permenpora No. 825 Tahun 2014 bertujuan untuk membentuk karakter pemuda Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Melalui pelatihan ini, pemuda diharapkan memiliki integritas, nasionalisme, dan kesadaran konstitusional yang kuat. Pelatihan mencakup aspek moral, etika, dan wawasan kebangsaan guna memperkuat identitas nasional di tengah tantangan globalisasi. Permenpora No. 59 Tahun 2013 mengatur strategi pengembangan kepemimpinan pemuda melalui pelatihan, pembinaan, dan pemberdayaan. Tujuannya adalah menciptakan pemimpin muda yang visioner, berintegritas, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional. Program ini menekankan pada penguatan kapasitas individu dan kolektif pemuda dalam berbagai sektor kehidupan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 merupakan landasan hukum terbaru yang mengatur tentang Karang Taruna sebagai organisasi sosial kepemudaan yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan penguatan peran Karang Taruna dalam pembangunan sosial berbasis masyarakat Karang Taruna didefinisikan sebagai organisasi sosial yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela sebagai wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat di wilayah desa atau kelurahan. Karang Taruna adalah organisasi sosial yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan. Karang Taruna bukanlah lembaga negara, tetapi tumbuh dari komunitas lokal sebagai bentuk kesadaran sosial masyarakat. Hal ini menegaskan karakter partisipatif, gotong royong, dan kemandirian dalam aktivitas sosial. Karang Taruna bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang bertanggung jawab sosial, mampu bekerja sama, dan memiliki jiwa kesetiakawanan sosial. Tujuan Karang Taruna adalah untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan generasi muda yang memiliki tanggung jawab sosial, mampu menjalin kerja sama kemitraan, serta memiliki jiwa kesetiakawanan sosial yang

tinggi.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepemudaan merupakan dasar hukum yang mengatur peran, hak, dan kewajiban pemuda dalam pembangunan nasional. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan ruang yang jelas bagi pemuda dalam berpartisipasi aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan (*agent of change*). Pemuda dalam konteks UU ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 16 sampai 30 tahun. Pemerintah berkewajiban menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan potensi pemuda melalui berbagai kebijakan dan program pembinaan. Isi UU ini mencakup berbagai aspek penting, seperti pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan partisipasi pemuda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, terdapat penekanan pada pentingnya pembinaan berkelanjutan, perlindungan terhadap pemuda, serta penyelenggaraan pelayanan kepemudaan oleh pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang ini juga menekankan peran organisasi kepemudaan sebagai mitra strategis dalam pengembangan sumber daya manusia pemuda.

Dalam implementasinya, UU Kepemudaan menjadi dasar bagi berbagai kebijakan strategis, seperti program kewirausahaan pemuda, pelatihan kepemimpinan, dan penguatan karakter kebangsaan. Keberadaan regulasi ini juga mendorong terbentuknya forum-forum kepemudaan, baik di tingkat lokal maupun nasional, yang bertujuan mengakomodasi suara dan aspirasi pemuda dalam proses pembangunan. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat, UU ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas, daya saing, dan kontribusi pemuda Indonesia. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya sosialisasi UU ini kepada kalangan pemuda dan belum meratanya pelaksanaan program pembinaan pemuda di seluruh daerah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, dan sektor swasta sangat diperlukan agar amanat UU ini dapat diwujudkan secara optimal, mendorong terwujudnya pemuda Indonesia yang berdaya, mandiri, dan berkarakter.

KESIMPULAN

Banteng Muda Indonesia (BMI) sebagai organisasi sayap PDI Perjuangan telah menunjukkan peran strategis dalam pendidikan politik generasi muda. Sejak awal pendiriannya, BMI tidak hanya berfungsi sebagai alat mobilisasi, tetapi juga sebagai wadah kaderisasi yang membentuk pemuda menjadi kader yang memahami ideologi partai dan nilai-nilai kebangsaan. Melalui berbagai kegiatan sosial, pelatihan kepemimpinan, dan seminar kebangsaan, BMI menjadi jembatan penting antara partai politik dan aspirasi pemuda. Transformasi peran BMI terlihat dari kemampuannya menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Inovasi digital menjadi salah satu langkah adaptif dalam menyampaikan materi politik kepada generasi milenial dan Gen Z. Pemanfaatan media sosial, konten edukatif, serta kolaborasi dengan lembaga pendidikan memperkuat efektivitas pendekatan mereka. Strategi ini membuktikan bahwa pendidikan politik dapat dikemas secara menarik, interaktif, dan relevan tanpa kehilangan substansi ideologisnya. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti apatisme pemuda dan keterbatasan akses teknologi, BMI mampu meresponsnya dengan pendekatan inklusif dan partisipatif. Melalui kombinasi antara edukasi digital dan kegiatan langsung di lapangan, BMI berkontribusi dalam membangun kesadaran politik dan partisipasi aktif anak muda. Dengan demikian, BMI tidak hanya menjadi pelengkap struktur partai, tetapi juga agen perubahan dalam pembentukan karakter politik generasi penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

Widiatmaka, P., Mujahidah, N., Rahmap, R., & Arifudin, A. (2023). Pendidikan karakter melalui karang taruna untuk membangun karakter sosial pada generasi digital native. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 14(1)

- Nugraha, Y., Sofyan, F. S., & Repelita, T. (2024). Pembentukan karakter Generasi Z melalui lembaga pusat karakter sebagai implementasi profil pelajar Pancasila. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 9(1)
- Zuhroh, F., Apriani, F., Yurniwati, Y., & Imaningtyas, I. (2024). Penguatan karakter Pancasila melalui Dasa Darma Pramuka di era digital. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 7(1).
- Usanto, S., Nurlaela, L., Ningtyas, S., & Syahrial, R. (2024). Pelatihan dan pengembangan kepemimpinan dalam membangun karakter siswa berlandaskan nilai-nilai Pancasila. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*
- Harizi, R., Wijaya, R. A., Trinadi, P., Saputra, A. C., & Jananda, B. (2025). Penguatan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter di sekolah: Implementasi dan tantangan di era globalisasi. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Konseling*, 2(4), 1268–1272.
- Sukamsi, S., Rahim, A., & Rohmah, S. N. (2025). Peran Organisasi Pelajar dalam Pendidikan Politik di Ma'had Al-Zaytun Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Fiqh Siyasah Dusturiyah. *JIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(4), 4113–4122.
- Pratama, I. A. (2023). Peran Pendidikan Politik Pada Organisasi Mahasiswa KAMMI dan IMM di Kota Pangkalpinang dalam Pembentukan Budaya Politik Pancasila. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 10(1)
- (Wachidah, M. F., Kusbandrijo, B., & Rochim, A. I. (2022). Implementasi Tugas Karang Taruna Menurut Permensos Nomor 25 Tahun 2019:(Studi Kasus Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya). *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469)*, 2(01), 124-132.)
- Panggabean, I. M., & Yuwono, T. (2023). Transformasi Media Pendidikan Politik di Era Politik Kontemporer melalui Website Bijakmemilih.id. *Jurnal Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro*.
- Wahyuni, W., & Jailani, J. (2023). Peran Pemuda sebagai Agen Transformasi Sosial dalam Masyarakat. *Jurnal Partisipasi dan Transformasi Masyarakat*, 17703-17708.
- Nugroho, E. P. (2023). Keterlibatan Pemuda dalam Politik: Dinamika dan Tantangan. *Liternote*, Vol. 2, No. 1.
- Prakoso, L. (2017). *Implementasi UU No. 9 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dalam Pemberdayaan Pemuda di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 118–127
- Haryanto, A. (2016). *Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Partisipasi Pemuda Berdasarkan UU Kepemudaan*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 20(3), 235–244
- uraini, S. (2019). *Analisis Pelaksanaan Kebijakan Kepemudaan Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2009*. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 45–55.

Disertasi/Tesis/Paper Kerja

- Nugraha, G. A. (2015). *Peranan Komite Nasional Pemuda Indonesia Sebagai Sarana Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemuda*. Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Faishol, M. A. (2019). *Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Pengamalan Nilai-nilai Pancasila Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ideologi Pemuda*. Tesis, Universitas Gadjah Mada.